

TIBA-TIBA TAWARKAN KEWARGANEGARAAN GANDA

DIUNGKAP LUHUT, HARUS AMANDEMEN UU KEWARGANEGARAAN

Meski bukan hal baru karena beberapa negara memiliki aturannya, kejutan mencuat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Sorotan pun mengalir dari dalam dan luar negeri. Diketahui, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Menurut hukum Indonesia, seorang anak dengan dua paspor harus memilih satu dan melepaskan yang lain ketika mereka berusia 18 tahun. Bahkan, masalah kewarganegaraan ganda menimbulkan kontroversi pada 2016 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan menteri energi dan pertambangan setelah kurang dari sebulan menjabat menyusul laporan bahwa ia memegang paspor AS dan Indonesia. Konsekuensinya harus dipertimbangkan lagi, kata pengamat.

Baca di hal 11....

Dasar Hukum soal Kewarganegaraan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Aturan soal Kewarganegaraan Ganda di RI

4 asas-asas yang dianut dalam UU Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- **Asas ius sanguinis (law of the blood)** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- **Asas ius soli (law of the soil)** secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan.
- **Asas kewarganegaraan tunggal** adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- **Asas kewarganegaraan ganda terbatas** adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan

Dalam Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan dikatakan bahwa pada dasarnya UU Kewarganegaraan, "RI tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatrie) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

*Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. (lanjutan di hal 11...)



**Government (Hal.2)
Kesepakatan
RI-Arab Saudi:
Umrah Wajib
Melalui PPIU**

Umrah Backpacker Kesepakatan RI-Arab Saudi: Wajib Melalui PPIU

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi menyepakati solusi bersama dengan pemerintah Indonesia dalam mengatur umrah backpacker. Disebutkan, jamaah umrah tetap memilih PPIU resmi terdaftar bila melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi Nusuk.

Dikutip Rabu (1/5/2024), solusi yang disebutkan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah adalah menyelaraskan Nusuk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pada pasal 86, dibahas perjalanan umrah harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Perlu diketahui, kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi mengizinkan ibadah umrah hanya dengan visa turis. Hal ini pun mempermudah masyarakat untuk melakukan umrah mandiri atau umrah backpacker melalui aplikasi Nusuk tersebut.

Menteri Tawfiq menyampaikan kesepakatan penyelarasan Nusuk dengan regulasi di Indonesia saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Selasa (30/4/2024).

Melalui pertemuan keduanya, Firman menyebut, Indonesia juga akan menjadi negara percontohan yang mengakomodir PPIU berizin dan memiliki kemampuan untuk bisa listed di aplikasi Nusuk.

"Jadi, kalau nanti mau lewat Nusuk, jamaah bisa memilih PPIU yang sudah listed di Nusuk," kata Firman.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas menegaskan bahwa umrah backpacker banyak dimanfaatkan oknum untuk melakukan hal dengan tujuan yang tidak baik.

"Bagaimana sering kali umroh dijadikan modus orang untuk menyalahgunakan antrian yang panjang atau mungkin mencari pekerjaan di Saudi dengan cara modern banyak modus-modus lain sehingga soal umrah backpacker ini akan semakin membuka peluang modus-modus yang tadi sudah dikhawatirkan," ujar Yaquut.

Pria yang akrab disapa Gus Men ini mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini. Yaquut menyebut akan mendalami terkait umrah backpacker tersebut.

Melalui rapat kerja bersama



Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah.

Komisi VIII DPR RI, dilihat secara daring, Senin (18/3/2024), Menag mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Duta Besar Arab Saudi terkait umrah backpacker.

"Kami Kementerian Agama sudah bicara dengan Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia. Dan hari Jumat yang lalu, saya sudah ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia secara teknis membicarakan bagaimana nanti cara mengatasi problem-problem yang muncul dalam umrah backpacker ini," jelasnya.

Gus Men juga menegaskan, pihaknya dan Arab Saudi sudah membentuk tim khusus untuk menangani fenomena umrah backpacker.

"Untuk memberikan insight, kebijakan-kebijakan yang bisa digunakan untuk menjadi jembatan antara Nusuk dan kepentingan kita. Kita sudah ada tim di PHU (Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah) dan kedutaan Saudi untuk mempersiapkan segala kebijakan yang diperlukan untuk menyiasati," terang Gus Men.

Gus Men juga mengungkapkan, pihaknya menawarkan platform kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. "Di Saudi itu menggunakan platform yang namanya Nusuk yang siapa saja orang tanpa harus tergabung di dalam travel, PPIU itu, dia bisa klik mengurus penerbangannya dan segala keperluannya di Saudi," pungkask Gus Men.

Fatwa Larangan Haji Ilegal

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menyampaikan regulasi baru Kerajaan Arab Saudi (KSA) terkait visa haji yang harus dimiliki oleh calon

jamaah haji, tidak boleh visa selain haji. Menteri Haji Saudi Tawfiq Al-Rabiah mengatakan, regulasi baru KSA ini didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ulama senior Arab Saudi.

Tawfiq Al-Rabiah menambahkan, calon jamaah harus mengikuti ketentuan dan proses perizinan ibadah haji yang dibuat otoritas KSA termasuk soal manasik haji melalui visa haji yang resmi dikeluarkan KSA. Ketertiban dan ketaatan hukum jamaah haji secara prosedural ini mengikat secara syariat dan berimbas pada hukum syar'i ibadah haji jamaah.

Ibadah haji yang dilaksanakan jamaah tanpa mengikuti jalur prosedural dan visa haji resmi dari KSA, kata Tawfiq Al-Rabiah, bermasalah secara hukum syariat. Ibadah haji tanpa prosedur formal dan visa resmi dapat berimbas pada tidak sahnya ibadah haji tersebut sesuai fatwa yang dikeluarkan ulama senior Saudi.

Berdasarkan pertimbangan fatwa ulama Saudi, syariat Islam tidak membolehkan seseorang warga negara untuk melaksanakan ibadah haji kecuali mengantongi visa resmi dari KSA dan tertib mengikuti ketentuan formal secara prosedural.

"Orang tidak bisa berhaji tanpa menggunakan visa haji yang resmi dan ditempuh secara prosedural. Orang tidak boleh berangkat haji tanpa proses prosedural yang sudah difatwakan ulama senior Saudi," kata Menteri Haji Saudi Tawfiq Al-Rabiah dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (30/4/2024) pagi.

KSA melarang keras praktik manasik jamaah haji di Tanah Suci yang menggunakan visa selain visa haji yang dikeluarkan KSA secara resmi. Maslahat dan mudarat berikut hukum syar'i terkait ibadah haji di luar

prosedur otoritas KSA tanpa visa resmi sudah digodok dalam majelis fatwa ulama senior Arab Saudi.

"Telah diterbitkan fatwa dari majelis ulama senior Arab Saudi yang menyatakan bahwa peraturan secara syariat tidak dibolehkan seorang melaksanakan ibadah haji, kecuali yang menggunakannya secara prosedural," katanya.

Otoritas KSA melarang keras praktik haji tanpa prosedur legal. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terguru haji mudah. Ia mengajak masyarakat untuk mengikuti semua prosedur formal yang dibuat oleh otoritas terkait.

"Soal visa haji prosedural, otoritas Saudi melarang keras dan menindak dengan sanksi tegas bagi travel dan individu yang melakukannya," katanya. (wid,rls,ant/ dya)

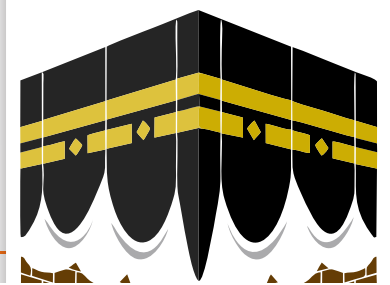
SYARAT BARU JAMAAH HAJI 2024

PERSYARATAN TERBARU

- Pendaftaran wajib di aplikasi Sehaty guna mengkonfirmasi vaksin yang diperlukan.
- Jamaah lokal di Arab Saudi sudah vaksin Covid-19, influenza, dan meningitis dalam 5 tahun terakhir.
- Jamaah internasional sudah vaksin Neisseria meningitidis 10 hari sebelum keberangkatan, dan harus mendapat vaksinasi polio.

KETENTUAN UMUM

- Paspor masih berlaku minimal akhir Juni 2024
- Usia minimal 12 tahun
- Sudah vaksin Covid-19, flu musiman, dan meningitis
- Surat keterangan kesehatan terbebas dari penyakit menular



Revisi UU MD3 Mencuat Lagi MPR, DPR, dan DPD Bakal Miliki UU Sendiri-sendiri

JAKARTA- Rencana perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) mencuat kembali. Hal ini seiring dengan rencana MPR, DPR, dan DPD memiliki UU masing-masing dan terpisah.

Ketua MPR RI sekaligus Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsot) membenarkan kabar itu. DIA mengatakan pemisahan UU MPR, DPR dan DPD akan menjadi legacy yang tengah disiapkan.

"Legacy lain yang sedang berjalan yakni mengenai kehadiran UU MPR," kata Bamsot melalui rilisnya, Rabu (1/5/2024).

Bamsot menjelaskan sangat penting bagi lembaga keparlemen seperti MPR, DPR, dan DPD untuk menjalankan amanat ketentuan UUD 1945 khususnya Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (4), yang mengamanatkan bahwa kelembagaan MPR, DPR, dan DPD diatur dengan UU tersendiri.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan pemisahan UU MPR, UU DPR, dan UU DPD sangat penting, sebab, masing-masing lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Dia mencontohkan MPR yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan UUD, berbeda dengan DPR dan DPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Bamsot menyebut pimpinan MPR akan segera bertemu pimpinan DPR untuk membahas hal tersebut.

"Sehingga perlu ada UU MPR, UU DPR, dan UU DPD yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Tidak seperti saat ini yang bergabung dalam UU MD3. MPR RI melalui Badan Pengkajian sudah menyelesaikan usulan naskah akademik dan rancangan UU MPR," ucap dia.

"Dalam waktu dekat, pimpinan MPR akan bertemu Pimpinan DPR untuk membahas pemisahan UU MD3 menjadi UU MPR, UU DPR, dan UU DPD, sebagai implementasi perintah undang-undang dasar," tambah Bamsot.

Dia menambahkan, MPR RI juga akan menghadirkan payung hukum pembentukan Badan Kehormatan MPR RI melalui perubahan Tata Tertib MPR RI yang dilakukan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi, Kelompok DPD, dan Alat Kelengkapan.

Rapat Gabungan juga akan membahas bentuk hukum dan substansi PPHN. Serta membahas perubahan lain dalam Tata Tertib MPR RI untuk mengubah/menyesuaikan beberapa ketentuan.

"Antara lain mengenai Kewenangan MPR untuk mengeluarkan Tap MPR (yang bersifat beschikking (keputusan) dan bukan regeling (peraturan)) untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan Keputusan KPU; Perbaikan



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot).dok

rumusan jenis putusan dan nomenklatur penulisan putusan/keputusan pada pasal 99 dan 100 Tata Tertib MPR; serta penyelenggaraan sidang tahunan MPR untuk memfasilitasi penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara secara langsung," ujar Bamsot.

Untuk Tingkatkan Kualitas

Sebelumnya anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKS Mardani Ali Sera, menyebut UU No 13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) perlu direvisi.

Namun, Mardani menyebut revisi dilakukan bukan untuk mengatak-ati aturan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi.

"Revisi UU MD3 diperlukan untuk meningkat kualitas dan kuantitas legislasi," tegas Mardani

Tak hanya itu, Mardani menekankan pentingnya revisi UU Pemilu untuk segera dilakukan. Mardani juga mengatakan revisi UU Pemilu harus beriringan dengan revisi UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilkada hingga UU MD3.

"Kalau disempurnakan dengan UU Pemda dan UU Hub Keuangan Pusat dan Daerah plus UU Desa lebih sempurna," papar Mardani.

"Ini namanya Reformasi UU Sistem Politik," tandasnya.

Diketahui, wacana merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengemuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada 22 April 2024.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu sehingga menimbulkan kebuntuan dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Ketua MK Suhartoyo mengatakan UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa

kampanye dimulai.

Dia juga mengatakan terdapat beberapa kelemahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu.

"Sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu, dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran pemilu," kata Suhartoyo.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin, setidaknya revisi UU Pemilu harus mencakup tiga hal. Pertama, UU Pemilu harus direvisi menyangkut aturan teknis yang menegaskan ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik, durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan jadwal cuti wajib dilaporkan ke KPU dan Bawaslu secara resmi.

Menurut dia, sorotan MK agar perjalanan dinas pejabat negara diatur ulang supaya tidak berhimpitan dengan jadwal kampanye itu layak ditindaklanjuti.

"Saya kira sangat penting untuk mengatur ulang kampanye para pejabat negara setingkat presiden/wakil presiden dan menteri ini. Selama ini mereka sadar atau tidak sadar sering kali menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat untuk kepentingan elektoral," kata Yanuar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (23/4/2024).

Kedua, kata dia, sanksi yang berat atas pelanggaran tersebut harus jelas, terukur, dan nyata. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar.

"Selama ini, tanpa sanksi yang berat dan jelas, presiden dan para menteri bisa seenaknya mempengaruhi pilihan politik rakyat dengan menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan kewenangannya secara terbuka untuk tujuan elektoral," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ketiga, pembagian bantuan sosial atau bansos, beasiswa, sertifikat

JEJAK REVISI UU MD3 SEJAK 2014-2019

1.KMP vs KIH

Revisi Undang-Undang MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden 2014. Prosesnya berlangsung setelah Pemilu Legislatif 2014 selesai. Saat itu PDI-P keluar sebagai pemenang. Akibat revisi Pasal 84 tentang penetapan pimpinan DPR, PDI-P selaku pemenang pemilu legislatif tak mendapat kursi pimpinan DPR. Sebab, kelompok oposisi berhasil mengubah aturan pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem paket, yang sebelumnya berdasarkan sistem proporsional.

2.Akomodasi KIH ke pimpinan AKD

Revisi UU MD3 dilakukan sebagai solusi mengakhiri konflik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Yaitu dengan mengakomodasi KIH ke dalam unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berupa sejumlah komisi dan badan. Revisi tersebut menambah satu kursi pimpinan AKD sehingga perwakilan KIH bisa masuk ke dalamnya. Pada revisi kali ini, ada delapan pasal UU MD3 yang dilakukan perubahan oleh DPR, yakni Pasal 74 Ayat 3, 4, 5 dan 6; Pasal 97 Ayat 2; 98 Ayat 7, 8 dan 9; Pasal 104 Ayat 2; Pasal 109 Ayat 2; Pasal 121 Ayat 2; dan Pasal 152 Ayat 2.

3.PDI-P Dapat Kursi Pimpinan DPR

Revisi UU MD3 pada Februari 2019 ini bernuansa pengakomodasian partai pemenang pemilu legislatif, yakni PDI-P yang tak kunjung mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. Meski tinggal 1,5 tahun DPR periode 2019-2024 akan berakhir, PDI-P tetap bersikeras memperjuangkan jabatan tersebut. Akhirnya DPR sepakat mengubah Pasal 84 tentang komposisi pimpinan DPR. Kursi pimpinan DPR ditambah satu dan diberikan untuk untuk PDI-P selaku partai pemilik kursi terbanyak. Kursi pimpinan juga ditambah dan diberikan kepada tiga partai, yakni PDI-P, Gerindra dan PKB.

4.Sepuluh Kursi Pimpinan MPR

Revisi UU MD3 kembali dilakukan. Seluruh fraksi di DPR sudah menyatakan persetujuannya dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9/2019) siang. Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang, yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

tanah, uang, dan peresmian-peresmian sarana atau prasarana yang berdampak pada masyarakat harus diatur ulang waktunya agar tidak tumpang tindih pada masa-masa kampanye.

"Tentu saja masih banyak aspek lainnya yang harus direvisi dalam UU Pemilu, termasuk lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilu. Fenomena ini harus dicari akar masalahnya agar konstruksi UU Pemilu mampu menjawab soal ini," tuturnya. (wid,rls,ant/dya)

May Day! 2 Tuntutan Utama Demo Buruh: Tolak UU Cipta Kerja dan OutSourcing

JAKARTA- Demo buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) berlangsung di berbagai daerah di Indonesia Rabu (1/5/2024). Merujuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sekitar 48.000 hingga 50.000 buruh 'mengepung' Jakarta--di Istana Negara dan Gelora Bung Karno. Ribuan buruh juga melakukan aksi serupa di kota masing-masing.

Ada pun dua tuntutan utama yang diserukan adalah pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan OutSourcing dengan upah murah (HOSTUM). Ada pula sembilan alasan mengapa buruh menolak aturan tersebut.

"Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah," kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal.

Kedua, faktor outsourcing seumur hidup karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Ketiga, kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali.

"Itu artinya, negara memposisikan diri sebagai agen outsourcing," tegas Said Iqbal.

Buruh juga menyoroti pesangon yang murah. Said Iqbal membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika di-PHK (pemutusan hubungan kerja) bisa mendapatkan dua kali pesangon, saat ini bisa mendapatkan 0,5 kali.

"Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Mudah memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja," ujarnya.

Pengaturan jam kerja yang fleksibel juga disorot. Lalu pengaturan cuti, menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.

"Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus

administrasinya sambil jalan," tambahnya.

"Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan," ujarnya lagi.

"Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia," tegasnya.

Kenaikan Upah di Bawah Inflasi

Kebijakan upah di Indonesia juga disorot. Di mana kebijakan ini berubah menjadi upah murah.

"Hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi. Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen," kata Said Iqbal.

Dia mencontohkan, di 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64%, Kabupaten Bekasi 1,59%, Kabupaten Karawang 1,57%. Kenaikan tersebut, kata dia, di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8% dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

"Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40%. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5%" ujarnya.

"Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya," tegasnya.

Pemerintah Tolak Adanya PHK Sepihak

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pemerintah berkomitmen menolak upah murah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Hal ini seperti yang diserukan para pekerja dan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional.

"Saya kira komitmen kami Kementerian Ketenagakerjaan, komitmen pemerintah, sama dengan komitmen teman-teman pekerja atau buruh. Kami tolak upah murah, kami juga menolak PHK secara sepihak," ujarnya menjawab pertanyaan media setelah acara



Beragam poster diusung para buruh dalam aksi May Day pada Rabu (1/5/2024) di berbagai wilayah seperti di Malang. (ist/ant)

puncak peringatan Hari Buruh (May Day) 2024 di Jakarta Utara, Rabu (1/5/2024).

Dalam upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan para pekerja dan buruh, pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Tujuan pedoman itu, memberikan penguatan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam dunia usaha, menciptakan kelangsungan berusaha dan keharmonisan hubungan kerja serta meningkatkan pengetahuan hubungan industrial Pancasila bagi pelaku dunia usaha dalam rangka persiapan menuju dunia kerja.

Terdapat enam prinsip dalam penerapannya, termasuk mengutamakan kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat dan pemerintah. Prinsip berikutnya adanya kerja sama antara pekerja dan pengusaha sebagai mitra saling membutuhkan, adanya hubungan fungsional dan pembagian tugas.

Di dalamnya terdapat prinsip falsafah kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, serta peningkatan kesejahteraan. Selain itu, menganut asas kekeluargaan dan gotong royong yang merupakan cerminan bangsa Indonesia.

Ida mengatakan dalam hubungan industrial Pancasila diperlukan asas musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan sopan santun, baik tindakan maupun gaya berbicara.

"Kami meminta kepada semua serikat pekerja/buruh dan manajemen perusahaan untuk memedomani hubungan industrial Pancasila," ujarnya. (wid, ant, rls/dya)

10 PROVINSI DENGAN JUMLAH BURUH YANG TERKENA PHK TERBESAR DI INDONESIA (JAN-FEB 2024*)

DKI Jakarta	3.651
Jawa Tengah	2.886
Jawa Barat	654
Riau	173
Jawa Timur	119
Sulawesi Tenggara	72
Kepulauan Riau	62
Nusa Tenggara Timur	27
Gorontalo	18
Bangka Belitung	9

Sumber : Databoks



Demo Buruh di Patung Kuda, Jakarta (ist/ant)

Harga Meroket dan Pembelian Dibatasi, **Stok Gula Menipis?**

JAKARTA- Harga gula di pasaran terus meroket. Bahkan, sejumlah ritel modern membatasi pembelian gula pasir.

Pembatasan dilaporkan di Indomaret Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Satu orang hanya dibolehkan membeli 1 kg gula per hari.

"Gula pasir 1 kg pembatasan pembelian: 1 PC/konsumen/hari," tulis Indomaret.

Pada Rabu (1/5/2024) harga gula dibanderol Rp 17.500 per kg. Gula pasir yang dijual di sana tersedia dari beberapa merek yakni Indomaret, Rose Brand, dan PSM. Sementara itu, Alfamart Tanjung Barat Lama tak ada pembatasan pembelian di Alfamart.

Merespons hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan stok gula pasir aman. Bahkan, ia menyebut musim panen tebu akan segera tiba.

"Ketersediaan gula aman. Kita akan mulai panen tebu dalam waktu dekat, Insyaallah 2 minggu ini," kata Arief Rabu (1/5/2024).

Arief mengatakan rata-rata harga gula pasir di retail Rp 17.500. "Kalau harga di pasar lebih tinggi sedikit," ujarnya.

Inflasi April Diperkirakan Turun

Di sisi lain, laju inflasi pada April 2024 diperkirakan akan sebesar 2,27% month on month (MoM) atau secara bulanan. Angka tersebut turun dari inflasi Maret 2024 yang sebesar 0,52% MoM.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, penurunan inflasi ini sebagian besar didorong oleh sektor bahan makanan seiring puncak musim panen terjadi di bulan April 2024.

"Musim panen cenderung dapat mengimbangi dampak dari Lebaran ketika permintaan bahan makanan biasanya meningkat secara musiman," tutur Josua, Selasa (30/4/2024).

Ia mencatat, pada April 2024 beberapa komoditas pangan



(Ilustrasi) Harga gula pasir terus mengalami kenaikan. (ist)

mengalami penurunan harga, termasuk beras, telur ayam, cabai merah, dan cabai rawit.

Sebaliknya, harga-harga meningkat untuk komoditas seperti daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng.

Kelompok pengeluaran lain yang berkontribusi terhadap inflasi April 2024 adalah transportasi, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Peningkatan ini terkait dengan meningkatnya permintaan selama liburan Lebaran, terutama untuk jasa transportasi, biaya rekreasi dan rekreasi, dan harga emas yang lebih tinggi.

Di samping itu, depresiasi rupiah yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa menyebabkan inflasi impor yang lebih tinggi, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Sementara itu, inflasi April 2024 secara tahunan diperkirakan relatif stabil dikisaran 3,02% year on year (YoY), turun tipis dibandingkan

dengan di Maret 2024 sebesar 3,05% yoy.

"Stabilitas ini terutama disebabkan oleh inflasi harga bergejolak yang lebih rendah karena penurunan inflasi bahan makanan, sejalan dengan puncak musim panen yang meningkatkan pasokan bahan makanan," kata Josua.

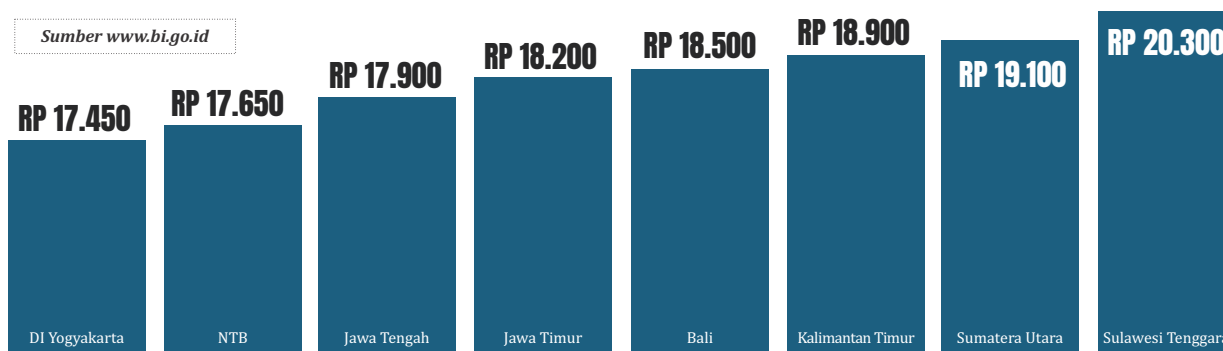
Lebih lanjut, untuk inflasi inti secara tahunan diperkirakan meningkat dari 1,77% YoY pada Maret 2024 menjadi 1,82% YoY di April 2024.

Inflasi inti, kata Josua didorong oleh peningkatan permintaan selama periode Lebaran, kenaikan harga emas, dan inflasi impor yang lebih tinggi karena depresiasi rupiah.

Sementara itu, pada akhir tahun 2024 diperkirakan berada dalam kisaran target 1,5% hingga 3,5% YoY, dengan potensi tekanan ke atas pada paruh pertama tahun 2024 yang berasal dari dampak El Nino dan inflasi impor yang lebih tinggi akibat depresiasi rupiah di tengah risiko suku bunga kebijakan global yang 'higher-for-longer' dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. (wid, ant, rls/dya)

8 PROVINSI DENGAN HARGA GULA PASIR TERMAHAL DI INDONESIA

Sumber www.bi.go.id



HARGA RATA-RATA DAN PERUBAHAN (01/5/2024)

BAWANG MERAH UKURAN SEDANG

Rp 53.050 per kg
↓ -7,09% (Rp - 4050)

BAWANG PUTIH UKURAN SEDANG

Rp 43.850 per kg
↓ -7,1% (Rp - 3350)

BERAS KUALITAS BAWAH I

Rp 13.700 per kg
↓ -3,19% (Rp - 700)

BERAS KUALITAS BAWAH II

Rp 13.650 per kg
↓ -3,19% (Rp - 450)

BERAS KULITAS MEDIUM I

Rp 14.400 per kg
↓ -7,99% (Rp - 1250)

BERAS KUALITAS SUPER I

Rp 15.850 per kg
↓ -6,49% (Rp - 1100)

BERAS KUALITAS SUPER II

Rp 15.350 per kg
↓ -6,69% (Rp - 1100)

GULA PASIR KUALITAS PREMIUM

Rp 18.600 per kg
↓ -1,85% (Rp - 350)

GULA PASIR LOKAL

Rp 18.300 per kg
↓ -0,27% (Rp - 50)

CABAI MERAH BESAR

Rp 33.540 per kg
↑ 12,06% (Rp 5950)

MINYAK GORENG KEMASAN BERMERK 2

Rp 19.650 per kg
↑ 1,03% (Rp 200)

Tangkal Banjir Kota Malang, Bozem Bakal Dibangun di Kawasan Sawojajar



Pj Wali Kota Malang dan jajaran kepala OPD saat meninjau bangunan bozem Tunggulwulung. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal membangun bozem di kawasan Sawojajar. Langkah ini diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan

Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto mengungkapkan, bozem merupakan infrastruktur penting dalam pengelolaan air hujan dan mencegah banjir genangan. Di mana saat ini, jumlah bozem di Kota Malang masih

sedikit dan kurang maksimal untuk mengatasi banjir.

"Kami juga berharap dan berkeinginan ada satu lagi bozem yang akan dibangun selain di Tunggulwulung dan Blimbing, yakni di kawasan Sawojajar. Sehingga harapannya bisa mengurangi banjir genangan yang selama ini sering terjadi di daerah Sawojajar," ujar Dandung, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/5/2024).

Mengenai lokasi yang potensial untuk penambahan bozem ini, Dandung menyebut kawasan sekitar Kelurahan Bareng sebagai opsi yang tepat. "Dulu kan sempat ada wacana di sekitaran Bareng. Jadi sepertinya itu masih menjadi lokasi yang tepat nanti di sana," katanya.

Namun, Dandung juga menekankan, pemilihan lokasi bergantung pada ketersediaan lahan milik Pemkot Malang. Jika tidak ada lahan yang tersedia, sambungnya, maka Dinas PUPR-PKP perlu merencanakan opsi lainnya.

"Pastinya kita harus upayakan dulu kalau ada lahan Pemkot di sana, ya kita menggunakan lahan yang dimiliki oleh Pemkot Malang, kalau ada. Kalau tidak ada ya harus kita rencanakan lainnya," jelas Dandung.

Lebih lanjut disinggung terkait waktu realisasi bozem, Dandung menyebutkan, pembangunan bozem di Sawojajar masih belum bisa dilakukan di tahun 2024 ini. Menurutnya, pembahasan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan usai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 nanti.

"Kalau di tahun 2024 ini sepertinya belum bisa. Mungkin nanti di 2025 atau setelah Pilkada nanti baru kita perdalam pembahasannya, sambil kita melihat rencana kerja lima tahun ke depan," ungkapnya.

Namun, ia menegaskan, kebutuhan tambahan bozem sangat mendesak. Terlebih kawasan Sawojajar menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat resapan air yang tinggi. "Yang jelas kalau bozem memang kita masih butuh tambahan. Target paling tidak 3-4 bozem," tukasnya. (Santi/Dya)

Sempat Dibekukan, Kini Kepesertaan Bantuan Iuran BPJS 129.534 Warga Kabupaten Malang Aktif Lagi

MALANG - Per 1 Mei 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang resmi mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) untuk 129.534 jiwa. Bupati Malang, Sanusi mengatakan, langkah ini untuk memberikan kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayahnya.

Sanusi menjelaskan, kepesertaan PBID sempat dinonaktifkan akibat masalah data, yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Menurut Sanusi, pengaktifan kembali ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2024 mendatang.

"Kemarin kita sudah ada kesepakatan dengan BPJS Kesehatan. Jadi sebanyak lebih dari 129 ribu jiwa kepesertaannya akan diaktifkan per 1 Mei 2024 ini, sampai Desember 2024," ujar Sanusi, dikonfirmasi awak media pada Rabu (1/5/2024).

Sanusi menegaskan, Pemkab Malang telah menyiapkan anggaran untuk membiayai BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Disebutkannya, total anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan ini mencapai Rp 53 miliar. Jumlah



Bupati Malang, Sanusi. (Santi/Lenteratoday)

tersebut diperkirakan cukup untuk menutupi kebutuhan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun, dengan tambahan dana cadangan.

"Anggaran yang diperlukan untuk PBID dari Mei hingga Desember itu sekitar Rp 47 miliar. Dengan demikian, ada kelebihan anggaran sekitar Rp 6 miliar yang dapat digunakan sebagai dana cadangan jika terjadi peningkatan jumlah peserta. Angka itu

masih fluktuatif. Sehingga sisa anggaran tersebut dipergunakan untuk cadangan," jelas Sanusi.

Dalam kesempatannya ini, Sanusi juga menanggapi rumor yang beredar di masyarakat terkait dengan isu Pemkab Malang menonaktifkan iuran BPJS Kesehatan bagi segmen PBID. "Jadi saya sampaikan itu tidak benar (bupati menghentikan iuran BPJS Kesehatan warga miskin)," tegas

Sanusi.

Pernyataan ini disampaikan Sanusi untuk mengatasi isu liar yang berkembang di masyarakat. Di mana isu ini mencuat setelah Pemkab Malang terungkap memiliki tunggakan sebesar Rp 86 miliar kepada BPJS Kesehatan pada 2023, akibat kesalahan data jumlah peserta PBID.

Lebih lanjut, tunggakan ini menjadi polemik karena Pemkab Malang hanya menganggarkan dana sekitar Rp 72 miliar, sementara ternyata kebutuhan yang sebenarnya mencapai Rp 250 miliar karena mencakup 466 ribu jiwa.

Terkait masalah ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang bahkan harus dicopot akibat adanya kesalahan input data tersebut. Namun, dengan kesepakatan baru ini, Sanusi ingin memastikan bahwa tidak ada penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang dibiayai oleh daerah.

"Jadi nanti ada dua skema bantuan BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Yang pertama itu bantuan dari pemerintah pusat, yang mencakup 121.826 jiwa dan masih tetap aktif. Sedangkan skema kedua untuk 129.534 jiwa yang dibiayai oleh Pemkab Malang ini," tukasnya. (Santi/Dya)

3 FILM MARTHINO LIO ADAPTASI KISAH NYATA

TIDAK banyak orang yang tahu, aktor berbakat Marthino Lio ternyata mempunyai bakat dalam hal menulis lagu hingga bernyanyi, lho.

Hal ini terasa sangat wajar, karena Marthino sendiri lebih memilih untuk aktif dalam bermain akting, daripada bermusik. Hingga baru-baru ini, Marthino Lio akan memerankan karakter musisi ternama Indonesia.

Peraih Aktor Utama Terpilih Piala Maya 2022 ini, rupanya akan segera merilis film terbarunya sebagai Glenn Fredly di film Glenn Fredly The Movie.

Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, siap tayang sejak 25 April 2024 di bioskop. Bagi Marthino sendiri, ada sekitar 3 film yang dia bintang, yang merupakan hasil adaptasi kisah nyata.

Angkat kisah sejarah Indonesia, pertama Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (2018). Menceritakan tentang Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang merupakan raja ketiga Mataram, yang memerintah sejak tahun 1613-1646. Di film ini, Marthino Lio berperan sebagai Sultan Agung saat muda, di bawah arahan sutradara Hanung Bramantyo.

Dusia yang terbilang sangat muda, Raden Mas Rangsang diberikan gelar Sultan Agung Hanyakrakusuma. Di mana, Sultan Agung bertugas untuk menyatukan kembali adipati-adipati di tanah Jawa, yang sempat berselisih akibat politik VOC.

Tidak hanya mengorbankan waktu dan nyawa, Sultan Agung juga harus mengorbankan cinta pertamanya, dengan menikahi gadis ningrat tanpa rasa cinta sama sekali.

Masih menceritakan tentang perjalanan sejarah Republik Indonesia, selanjutnya Buya Hamka (2023). Sebuah film bergenre drama biografi religi, yang siap mengupas tuntas tentang perjalanan dakwah hingga keluarga, dari seorang ulama besar Indonesia.

Kali ini, Marthino Lio berperan sebagai Amir, di bawah arahan sutradara Fajar Bustomi.

Bagian pertama dari film Buya Hamka (2023), menceritakan tentang perjuangan dari seorang ulama bernama Buya Hamka untuk membesarkan agama Allah melalui organisasi Muhammadiyah yang dia urus di Makassar.

Selain itu, Buya Hamka juga melakukan aksi kritik yang cukup keras terhadap politik bangsa Jepang, melalui tulisan-tulisannya. Terbaru dan akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia, Glenn Fredly the Movie (2024).

Memiliki postur tubuh yang terbilang mirip hingga memiliki kualitas akting yang mumpuni, Marthino Lio terpilih memerankan karakter Glenn Fredly.

Uniknya, film ini akan diarahkan oleh seorang aktor ternama Indonesia bernama Lukman Sardi.

Glenn Fredly the Movie, akan mengambil sudut pandang dari musisi ternama Indonesia yang cukup dramatis.

Memiliki hubungan yang kurang baik dengan sang ayah, Glenn ternyata memiliki sisi kemanusiaan yang sangat besar. Di mana, dia rela menggunakan semua keuntungan bernyanyi dan karir, demi membuat konser kemanusiaan di Ambon.

Marthino Lio, selalu menjadi salah satu aktor yang cukup sukses memerankan berbagai karakter. Makanya tidak aneh, jika hampir setiap tahunnya selalu produktif dan dipadati dengan berbagai proyek film dan series. Di tahun 2024 saja, akan merilis 3 judul film.

Profil

Marthino Lio memiliki nama lengkap Rafael Guiliano Marthino Lio dan sapaan akrabnya adalah Lio.

Dia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 Januari 1989. Ayahnya bernama Ignatius Tommy Pratomo sementara ibunya bernama Emanuella Marly. Lio awalnya beragama Kristen, namun pada awal 2022 dia menjadi muallaf. Lio memiliki hobi bernyanyi, bermusik dan memelihara burung hantu.

Perjalanan Karier Marthino Lio

Pada 2004, Marthino Lio mengawali kariernya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang pemilihan cover boy untuk majalah Aneka Yess! dan menjadi juara kedua. Kemudian, pada 2005, Lio terpilih sebagai juara pertama dari ajang Putra Putri Bahari dan mendapat gelar Putra Bahari.

Pada 2005, ia memulai debut

aktingnya dalam FTV bergenre drama tragedy yang berjudul Taubat, Iman dan Hidayah. Lalu sinetron Malin Kundang pada 2005-2006, Pengen Jadi Bintang pada 2006-2007, Si Yoyo pada 2006, Cinderella Boy dan Bawang Putih Bawang Merah pada 2007, Toko Kr.Amat, Hikmah Kisah Nyata, dan Ibrahim Anak Betawi pada 2013.

Pada 2013, Marthino Lio mulai debut pada film layar lebar berjudul Merry Go Round, dari sini beragam genre film ia bintang, mulai drama komedi, romantis, thriller, action, horor hingga film biopik.

Film yang dibintanginya yakni 3 Pilihan Hidup pada 2016, The Guys pada 2017, Eiffel...I'm in Love 2 dan Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta pada 2018, Matt & Mou, Mantan Manten, #MoveOnAja dan Sin pada 2019, Tersanjung the Movie, Persepsi, Cinta Bete, Losmen Bu Broto, Kadet 1947 dan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas pada 2021.

Lalu, Gendut Siapa Takut?!, Pamali dan The Big 4 pada 2022, Balada Si Roy, Mangkujiwo 2, Jin Qorin, Sewu Dino, Buya Hamka, Detektif Jaga Jarak, Layangan Putus the Movie dan Hamka & Siti Raham Vol. 2 tahun 2023. Serta Glenn Fredly the Movie dan Dosa Turunan yang akan rilis 2023.

Dia juga pernah memerankan dua film pendek yakni Sleep Tight tahun 2015 dan Sekar tahun 2018. Beberapa serial web yang diperankannya yakni Grisse tahun 2018, Nawangsih tahun 2019, Rumah Biru the Series dan Nikah Milenial tahun 2021, Layangan Putus tahun 2021-2022, Assalamualaikum Calon Imam Season Two tahun 2022, Suami-Suami Masa Kini 2 tahun 2023, dan Losmen Bu Broto dan Sang Diva yang akan

tayang 2024.

Dia juga menjajal dunia tarik suara dalam lagu berjudul Ratusan Purnama tahun 2016, bersama Melly Goeslaw. Ini adalah lagu tema Ada Apa dengan Cinta? 2. Dia juga pernah berkolaborasi dengan band Element dan Cantika Abigail dalam lagu Cinta Misterius tahun 2008 (berbagai sumber)



PSIKOLOGI BAGIKAN KIAT JAGA KESEHATAN MENTAL IBU



KETUA Asosiasi Psikolog Rumah Sakit Indonesia (APRSI) Dian Kristyawarti Hasbara membagikan beberapa kiat untuk menjaga kesehatan mental bagi ibu agar tetap nyaman ketika beraktivitas dan menjadi tenang ketika mengasuh anak.

Melalui seminar edukasi kepada masyarakat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghadirkan dokter spesialis jiwa dari RSUD Tarakan Jakarta, dr Zulvia Oktanida Syarif, SpKJ dan dokter spesialis jiwa Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit Jakarta, dr Yenny Sinambela, SpKJ (K) untuk memberikan materi edukasi tersebut yang bertajuk "Bahagia Tanpa Syarat".

Dokter spesialis kesehatan jiwa tersebut sepakat bahwa faktor penghambat kebahagiaan kerap berasal dari munculnya tekanan dalam diri seseorang untuk bisa mencapai sesuatu yang itu ia dapatkan dari standar ukur kebahagiaan orang lain.

"Misalnya usia segini mestinya sudah menikah, usia sekian mestinya sudah bekerja. Kemudian kalau sudah

menikah, mestinya sudah hamil, begitu. Jadi banyak sekali standar-standar sosial yang menjadi pressure atau tekanan, itu akan menghambat orang menjadi bahagia," kata dr Zulvia yang akrab disapa dr Vivi.

Sementara dr Yenny menimpali juga bahwa, menurut dia, ukuran kebahagiaan orang lain tentu berbeda.

Karena pada diri manusia memiliki keunikannya sendiri-sendiri yang bisa dipandang sebagai kelebihan maupun kekurangan.

"Permasalahan muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi tertentu. Untuk merasa bahagia, seseorang mesti belajar untuk menerima kalau dirinya unik sehingga bisa melihat sisi positifnya, tidak terpaku pada sisi negatifnya saja," kata dr Yenny.

Di era internet seperti sekarang, sangat mudah untuk memberikan ekspektasi-ekspektasi tertentu sebagai standar kebahagiaan, sehingga banyak sekali penghambat-penghambat yang membuat seseorang merasa tidak bahagia.

Misalnya, flexing atau aktivitas

pamer barang mewah atau hidup mewah lewat media sosial. Hal itu berdampak pada ukuran kebahagiaan menjadi berdasarkan materi. Padahal tidak selalu seperti itu.

Penyelenggaraan Jakarta Berjaga oleh Dinkes DKI Jakarta menjadi salah satu sarana penyadaran masyarakat untuk peduli dengan kebahagiaannya sendiri. Hal itu agar permasalahan kesehatan mental di Jakarta berkurang. Jakarta masuk ke dalam daftar 10 kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia, berdasarkan laporan The Least and Most Stressful Cities Index tahun 2021.

Riset global yang lain dalam Health Service Monitoring 2023 yang menyurvei pandangan 23.274 responden dewasa yang tersebar di 31 negara pada periode 21 Juli-4 Agustus 2023 menyatakan bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling mengkhawatirkan, di atas kanker.

Oleh sebab itu, Dinkes DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Berjaga (Berjaga akronim dari Bergerak, Bekerja, Berolahraga dan Bahagia), di mana salah satu poin acaranya ialah

seminar edukasi kepada masyarakat mengenai cara mencapai bahagia.

Mengutip alodokter, sikap membandingkan diri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jika dibiasakan, sikap ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial dan kesehatan mental.

Hampir semua orang pernah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Sikap ini terkadang bisa membangkitkan semangat untuk mempelajari hal baru agar tidak tertinggal.

Selain itu, sikap ini juga dapat menyadarkan segala kekurangan yang dimiliki sehingga memacu diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Namun, membandingkan diri dengan orang lain bukan lagi hal yang baik ketika orang lain menjadi patokan kualitas hidup.

Hal ini dapat memicu perasaan iri yang bisa menurunkan rasa percaya diri, menghambat potensi diri, membuat murung, dan menimbulkan perasaan tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri (Antara)



"Upaya menjaga kesehatan mental ibu, yang pertama itu istirahat yang cukup, karena tidur yang cukup membantu menjaga keseimbangan kimia otak yang sehat dan penting untuk kesehatan mental,"

Dian Kristyawarti Hasbara

CHINA RANGKUL PERKEMBANGAN PESAT AI

MENGENAKAN jepit rambut merah muda, kaos putih, dan celana pendek merah muda, seorang "gadis cilik" yang terlihat berusia tiga atau empat tahun menjadi sorotan dalam pameran Forum Zhongguancun 2024 yang sedang berlangsung di Beijing.

"Gadis cilik" bernama Tong Tong tersebut, atau Little Girl dalam bahasa Inggris, merupakan avatar kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) virtual canggih berbasis kecerdasan umum buatan (artificial general intelligence/AGI), menurut Direktur Institut Kecerdasan Buatan Umum Beijing, Zhu Songchun pengembang produk tersebut.

Dalam demonstrasi video, setelah diprogram untuk menyukai hal-hal yang rapi, Tong Tong secara mandiri mengambil lap untuk mengelap tumpahan susu saat dia melihatnya di atas meja. Perilaku ini berasal dari keputusan otonomnya yang diambil berdasarkan panduan nilai, alih-alih program yang sudah disiapkan sebelumnya.

"Berbeda dengan AI konvensional, dia dapat memahami kata-kata Anda, menafsirkan maksud Anda, dan secara proaktif menawarkan bantuan," jelas Zhu, seraya menambahkan bahwa Tong Tong diharapkan dapat diterapkan dalam berbagai skenario dan memberdayakan industri yang mencakup enam bidang, termasuk sektor kegawatdaruratan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan melimpahnya inovasi AI seperti Tong Tong, China kini melihat industri AI-nya berada di jalur cepat. Menurut data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, skala total industri AI inti China telah mencapai 500 miliar yuan (1 yuan = Rp2.236), atau sekitar



70,37 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.208), dan jumlah perusahaan terkait menembus 4.400.

Dalam bidang berkendara otonomos, kendaraan nirawak yang didukung teknologi AI dapat secara otomatis memilih rute yang optimal, mempertahankan kecepatan yang tepat, dan melewati ruas-ruas jalan yang kompleks dengan mulus. Di bidang medis, robot bedah yang dilengkapi dengan sistem AI dapat membantu meningkatkan presisi dan akurasi pembedahan, yang berkontribusi dalam mengurangi rasa sakit pasca operasi dan mempersingkat masa rawat inap pasien di rumah sakit.

Mengenai large language model (LLM), yang telah menjadi arus utama pengembangan AI, data resmi menunjukkan bahwa jumlah LLM yang

dikembangkan secara mandiri di China menempati urutan kedua di dunia, dan lebih dari 100 LLM dengan lebih dari 1 miliar parameter telah diluncurkan di China.

Wang Haifeng, chief technology officer untuk raksasa teknologi China, Baidu, mengungkapkan bahwa basis pengguna produk LLM mereka yang mirip dengan ChatGPT, yang diberi nama Ernie Bot, telah melampaui 200 juta pengguna. Produk ini menyediakan berbagai jenis layanan, termasuk menyusun naskah pidato, rencana bisnis dan instruksi, serta menggambar bagan beralur dan peta konsep (mind map), yang mencakup banyak aspek pekerjaan dan kehidupan.

"Saat ini, China sedang melakukan upaya untuk menguasai algoritma LLM tingkat lanjut, memajukan

integrasi mendalam antara perangkat lunak dan perangkat keras komputasi, serta mempercepat transformasi teknologi ke penerapan di berbagai sektor," ungkap Chairman iFlytek Liu Qingfeng. iFlytek merupakan salah satu perusahaan AI terkemuka di China.

Di mata Liu, China telah membentuk keunggulan komparatif di bidang LLM suara dan LLM medis.

"Semakin banyak skenario penerapan AI yang inovatif dan bentuk produk yang diharapkan akan muncul pada 2024," tutur Wu Hequan, seorang akademisi di Akademi Teknik China (Chinese Academy of Engineering/CAE). "China saat ini menjadi negara terdepan dalam bidang internet, dan akan menjadi negara terdepan dalam penerapan AI," tuturnya (Antara)





MASA KECIL POSITIF KURANGI RISIKO DEPRESI REMAJA

SEBUAH studi baru-baru ini menyebutkan bahwa pengalaman masa kecil yang positif dan bahagia dapat mengurangi risiko seorang remaja mengalami depresi atau gangguan kecemasan.

Dilansir dari Medical Daily, seorang peneliti bernama Hasina Samji dari Universitas Simon Fraser di Kanada, Amerika Serikat, melakukan penelitian pada lebih dari 8.800 pelajar dari bulan Januari hingga Maret 2022.

Pesertanya adalah siswa kelas 11 di sekolah British Columbia yang diminta untuk mengingat kembali sejumlah pengalaman positif dan buruk yang mereka alami hingga usia 18 tahun.

Para siswa juga diminta untuk menilai tingkat keparahan gejala depresi dan kecemasan mereka serta menilai kesejahteraan mental dan kepuasan hidup mereka secara keseluruhan.

Hasilnya menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengalami empat atau lebih pengalaman masa kecil yang buruk, berpotensi empat kali mengalami depresi dan kepuasan

hidup yang rendah, berisiko tiga kali mengalami kecemasan dan 30 kali lebih mungkin melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan orang yang tidak memiliki pengalaman masa kecil yang buruk.

“Remaja yang tidak memiliki pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan (ACE) memiliki kesehatan mental dan kesejahteraan yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki satu atau lebih ACE,” kata para peneliti dalam penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Child Abuse and Neglect.

Samji menyoroti kesengsaraan menyebabkan banyak dampak buruk di berbagai bidang, baik itu penyakit menular, atau penggunaan narkoba, atau obesitas, atau penyakit jantung.

“Ketika Anda melihat orang-orang yang telah mengalami empat atau lebih pengalaman buruk di masa kanak-kanak, dibandingkan dengan lebih sedikit atau sama sekali tidak mengalami pengalaman buruk—mereka berisiko lebih tinggi mengalami hampir semua dampak buruk kesehatan,” kata Samji.

Oleh sebab itu, guna menjaga

kesehatan mental para remaja terutama pasca pandemi COVID-19, ia meminta semua pihak untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh para remaja untuk melewati krisis yang terjadi dalam kehidupan mereka.

“Saya memang ingin ke hulu dan memikirkan dukungan di tingkat individu, tapi juga dukungan struktural dan sistemik seperti apa yang bisa kita berikan lebih awal,” ucapnya.

Terpisah, dokter umum dr. Alfi Auliya MKM C.DCAP mengatakan anak muda yang sering mengikuti olahraga 'kekinian' dan melakukan modifikasi gaya hidup dapat mencegah penyakit secara umum untuk investasi kesehatan di kemudian hari.

“Masih muda pasti suka ikut olahraga fun run, zaman sekarang ada zumba, poundfit, itu bisa jadi salah satu pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah suatu penyakit,” kata Alfi dalam diskusi kesehatan bersama Halodoc di Jakarta.

Dokter lulusan Universitas Trisakti ini mengatakan, olahraga yang berkembang saat ini bisa menjadi investasi kesehatan di masa

mendatang dan penting bagi anak muda zaman sekarang mengubah pola hidup sehatnya dengan rajin berolahraga.

Ia juga mengatakan, masyarakat harus mengubah mindset bahwa sakit bisa dengan mudah diobati hanya dengan pergi ke dokter atau mengikuti asuransi kesehatan. Namun Alfi mengatakan peran dokter hanya untuk promotif dan kuratif pengobatan penyakit spesifik, sehingga masyarakat harus lebih perhatian kepada kesehatan diri sendiri secara keseluruhan agar tidak berisiko mengidap penyakit kronis.

“Karena penyakit kronis nggak tahu tiba-tiba datang, pas di cek gula dan kolesterol semua tinggi dan berisiko merugikan diri sendiri dan orang lain, produktivitas berkurang, aktivitas berkurang, pekerjaan jadi terganggu dan berdampak pada finansial,” katanya.

Selain mengecek kesehatan secara berkala, vaksinasi juga diperlukan untuk upaya preventif dan sangat baik untuk meringankan gejala penyakit, komplikasi berat hingga kematian (Antara)



“Masih muda pasti suka ikut olahraga fun run, zaman sekarang ada zumba, poundfit, itu bisa jadi salah satu pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah suatu penyakit,”

dr. Alfi Auliya MKM C.DCAP

Tiba-tiba Tawarkan ... (dari Hal 1)

RENCANA pemberian kewarganegaraan ganda selalu menuai pro dan kontra di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat (PD) Bramantyo Suwondo ikut menyoroti wacana tersebut. "Saya rasa untuk menarik diaspora Indonesia agar berkontribusi di Indonesia tidak hanya semata-mata mengenai status kewarganegaraan saja," kata Bram kepada wartawan, Rabu (1/5/2024).

Bram meminta ekosistem bekerja di Tanah Air perlu dibenahi betul. Dia juga meminta birokrasi yang mendukung kenyamanan bekerja di Indonesia harus dievaluasi.

"Kita mengharapkan suatu lingkungan kerja di mana keahlian atau ilmu kita bisa dihargai secara profesional. Pekerjaan yang mampu menjadi tempat bertumbuh, mengembangkan diri, ilmu, dan tentu saja dengan timbal balik yang sepadan," ucapnya.

Sementara, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal dan anggota Komisi I DPR, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Sebelumnya, Luhut menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia.

"Ini sudah lama memang saya dorong kepada pemerintah, bagus kalau Pak Luhut dukung juga," tutur Founder FPCI itu kepada, Rabu (1/5/2024). Diketahui, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) adalah suatu organisasi nirlaba dan non-politis yang bergerak di bidang hubungan internasional, dan terbuka untuk semua kalangan,

Sejak 2013, Dino telah menyatakan dukungannya terhadap isu ini. Menurut Dino, dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang diterapkan bagi diaspora Indonesia di luar negeri akan menambah nilai bagi kemajuan Indonesia.

"Saya mendukung dwi kewarganegaraan secara selektif, berdasarkan analisa untung dan rugi, baik dari sisi inovasi, teknologi, maupun modal bagi kepentingan Indonesia," ungkap Dino pada November 2013.

Terpisah, Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, juga sepakat dengan gagasan Luhut itu. Meski begitu, Dave mengatakan perlu ada pembahasan komperhensif terkait rencana tersebut.

"Tentu perlu pendalaman akan hal ini, memastikan nilai-nilai positifnya sejauh mana. Dalam setiap kebijakan pasti ada baik dan kurang baiknya. Agar pemerintah dan DPR dapat benar-benar mendalami hal ini," kata Dave kepada wartawan.

Dave menuturkan, jika diaspora diberikan kewarganegaraan ganda, otomatis mereka akan mendapat jaminan hukum. Oleh sebab itu ia mendukung wacana ini.

Hikmahanto, pengamat dan Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), mengatakan prinsip yang mendasari adalah bahwa UU kewarganegaraan tidak boleh diubah secara sembrono.

Menurutnya, jika pemerintah ingin mewujudkan rencana ini, perlu dilakukan amandemen terhadap UU Kewarganegaraan yang sudah ada.

"Pihak yang mendukung berpendapat bahwa langkah ini dapat mengundang talenta dan investasi asing yang menguntungkan bagi pembangunan negara. Namun, pihak yang menentang melihat potensi risiko dari segi keamanan dan pencegahan upaya penghindaran pajak serta pelanggaran hukum lainnya," jelasnya, Rabu (1/5).

"Pengaruhnya bisa bermacam-macam. Maraknya orang kaya Indonesia tidak bayar pajak di Indonesia. Belum lagi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menghindari dari kejaran hak aparat penegak hak di Indonesia," ungkapnya.

Menurut Hikmahanto, konsekuensi dari perubahan aturan kewarganegaraan harus dipertimbangkan dengan serius, tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga aspek keamanan dan hukum lainnya.

"Jadi harus dipikirkan konsekuensi besarnya tidak hanya dari sisi kepentingan industri digital. Intinya masalah dwikewarganegaraan harus dilihat dari berbagai perspektif, tidak hanya ekonomi," tutupnya.

Kemudian, apa dampaknya jika seorang WNI diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda?

"Bisa macam-macam. Bisa maraknya orang kaya Indonesia tidak bayar pajak di Indonesia," jelas Hikmahanto. "Belum lagi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti menghindari dari kejaran hukum, atau aparat penegak hukum di Indonesia," tutupnya.

Menurut data imigrasi, sebanyak 1.000 pelajar Indonesia berusia antara 25—35 tahun memutuskan menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya.

Sementara itu, tingkat pengangguran lokal berada di angka 5,3%. Menurut badan statistik, tingkat pengangguran untuk usia 15 hingga 24 tahun mencapai 19,4%.

Sorotan Media Asing

Media asing pada Selasa (30/4/2024) menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Pandjaitan yang mengatakan pemerintah berencana menawarkan kewarganegaraan ganda kepada mantan warga negara Indonesia untuk menarik lebih banyak pekerja terampil ke negara ini.

Kantor berita Inggris Reuters, media Malaysia The Stars hingga media Amerika Serikat Bloomberg melaporkan Luhut mengatakan hal ini saat bertemu CEO Microsoft Satya Nadella, yang menjanjikan investasi sebesar US\$1,7 miliar di Indonesia.

"Kami juga mengundang diaspora Indonesia dan kami akan segera

memberikan mereka kewarganegaraan ganda," ujarnya. "Yang menurut saya akan... membawa orang-orang Indonesia yang sangat terampil kembali ke Indonesia."

Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Menurut hukum Indonesia, seorang anak dengan dua paspor harus memilih satu dan melepaskan yang lain ketika mereka berusia 18 tahun.

Negara ini berupaya untuk memiliki hampir 3.000 pemuda yang siap bekerja sebagai pengembang pada 2029 dan pusat kecerdasan buatan di Bali, tambahnya pada pengarahannya tersebut.

Hampir 4.000 orang Indonesia menjadi warga negara Singapura antara 2019 hingga 2022, menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi.

Ditambahkannya, sebanyak 1.000 pelajar Indonesia berusia antara 25 dan 35 tahun telah memutuskan untuk menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya.

Badan imigrasi tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai rencana untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda.

Undang-undang di Indonesia saat ini melarang kewarganegaraan ganda, meskipun negara ini sedang menghadapi arus keluar tenaga kerja yang mencari prospek pekerjaan yang lebih baik di luar negeri.

Tingkat pengangguran lokal mencapai 5,3%, dan tingkat pengangguran bagi mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun berada pada angka 19,4%, menurut badan statistik.

Masalah kewarganegaraan ganda menimbulkan kontroversi pada 2016 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan menteri energi dan pertambangan setelah kurang dari sebulan menjabat menyusul laporan bahwa ia memegang paspor AS dan Indonesia.

Secara lengkap dalam pertemuan itu Luhut menyinggung soal orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).

Di kanal YouTube-nya, awalnya Luhut menjelaskan bahwa pada 2029 nanti, Indonesia bakal punya hampir 3.000 anak muda yang siap untuk bekerja sebagai pengembang perangkat lunak (software developer). Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan perkara software.

"Namun demikian, kami juga mengundang diaspora Indonesia untuk kami berikan juga segera kepada mereka: kewarganegaraan ganda. Jadi mungkin mereka sudah jadi warga negara Amerika (Serikat), tapi mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia," kata Luhut dalam bahasa Inggris.

Cara ini bakal berdampak besar untuk ekonomi Indonesia. Juga, cara tersebut dapat membawa sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni kembali ke Indonesia.

Dalam sebuah penelitian, soal dwi kewarganegaraan sudah menjadi perhatian dunia. Sebuah riset pada 2022 oleh Ladan Rahbari di University

of Amsterdam menggali isu kewarganegaraan ganda dan dampaknya terhadap warga Iran yang tinggal di luar negeri.

Iran merupakan satu dari banyak negara di dunia yang memberlakukan kewarganegaraan ganda. Hal itu berlaku bagi warga Iran ketika seseorang dianggap sebagai warga negara oleh dua negara.

'Undang-undang Jus Sanguinis' pemerintah Iran juga memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak secara otomatis jika ayahnya berkewarganegaraan Iran. Studi ini mengambil contoh kasus Nazanin Zaghari-Ratcliffe, seorang warga negara ganda Iran-Inggris yang ditahan di penjara Iran selama lima tahun.

Temuannya mengungkap bahwa warga Iran dengan kewarganegaraan ganda, juga menghadapi pemeriksaan perbatasan dan visa yang intensif, tuduhan kriminalitas, interogasi, pemenjaraan, dan pengecualian dari partisipasi penuh oleh pemerintah negara kelahiran mereka. (wid,rls, blo,tmp/dya)

lanjutan dari hal 1...

Kewarganegaraan Ganda Terbatas yaitu warga negara Indonesia yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau belum kawin, bagi:

1. Anak yang lahir dari perkawinan campuran antar WNI dan WNA,
2. Anak yang diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI,
3. Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia yang negaranya berasaskan Ius Soli (memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir).

NEGARA- NEGARA YANG MENGIZINKAN MILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA

- Albania
- Armenia
- Gambia
- Kroasia
- Latvia
- Haiti
- Peru
- Malta
- Swiss
- Santo Lusia
- Rep. Afrika Tengah
- Trinidad & Tobago
- Aljazair
- Australia
- Chill
- Siprus
- Jerman
- Honduras
- Libanon
- Mauritius
- Filipina
- Saint Vincent dan Grenadines
- Suriah
- Tunisia
- Samoa Amerika
- Barbados
- Kolombia
- Republik Ceko
- Ghana
- Hongkong
- Lithuania
- Meksiko
- Polandia
- Samoa
- Taiwan
- Turki
- Angola
- Israel
- Komoro
- Amerika Serikat
- Yunani
- Britania Rakyat
- Luksemburg
- Spanyol
- Portugal
- Tajikistan
- Pakistan
- Antigua & Barbuda
- Korea Selatan
- Republik Kongo
- Kanada
- Granada
- Finlandia
- Makau
- Kamboja
- Rumania
- Islandia
- Thailand
- Maroko
- Argentina
- Serbia
- Kosta Rika
- Irak
- Guatemala
- Sudan Selatan
- Makedonia
- Uruguay
- Rusia
- Selandia Baru
- Tibet
- Papua Nugini
- Australia
- Kenya
- pantai Gading
- Guinea Ekuator
- Guinea-Bissau
- Perancis
- Mali
- Kota Vatikan
- Saint Kitts & Nevis
- Vietnam
- Tonga
- Mesir
- Swedia

Netanyahu

Ketar-ketir Jadi Buronan ICC

JAKARTA-Pemerintah Israel berusaha mengantisipasi perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari pengadilan kriminal dunia atau ICC, di Den Haag, Belanda. Kabar ini menyusul laporan terbaru yang menyebutkan ICC juga akan mengeluarkan putusan sama bagi Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel (IDF) Herzi Halevi.

Kekhawatiran Netanyahu tampak dari komentar soal isu tersebut dengan mengatakan negaranya tidak akan mengakui putusan ICC. "Di bawah kepemimpinan saya, Israel tidak akan pernah menerima upaya apa pun dari ICC untuk melemahkan hak bawaannya untuk membela diri," tulisnya di X dikutip Rabu (1/5/2024).

ICC menyelidiki individu yang diduga bertanggung jawab atas salah satu dari empat kejahatan luar biasa yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau memulai perang agresif. ICC sebenarnya telah menyelidiki kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Israel sejak 2021.

Dalam sebuah pernyataan video, Netanyahu juga menuduh ICC sengaja ingin melumpuhkan dan mencegah Israel membela diri melawan terorisme dengan cara ingin mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk beberapa pejabat tinggi Tel Aviv, termasuk dirinya.

"80 tahun setelah Holocaust, badan-badan

internasional yang didirikan untuk mencegah Holocaust lainnya sedang mempertimbangkan untuk menolak hak negara Yahudi (Israel) untuk membela diri dari mereka yang datang untuk melakukan genosida (pembunuhan besar-besaran terencana) terhadap kami, dan masih secara aktif berupaya untuk melakukannya," ujarnya dalam pernyataan video tersebut yang dikutip dari Times of Israel.

"Sungguh sebuah absurditas, sebuah distorsi terhadap keadilan dan sejarah," imbuhnya.

Ia berasumsi surat perintah penangkapan itu diminta oleh pemimpin-pemimpin negara yang tidak setuju dengan Israel terkait perang di jalur Gaza. Padahal, itu dinilai sebagai pembelaan dan melindungi negaranya.

Menurut Netanyahu, apabila betul surat penangkapan dikeluarkan untuk tokoh-tokoh penting Israel karena kejahatan perang, maka hal tersebut akan menjadi skandal terbesar dalam sejarah.

"Ini menjadi noda yang tidak dapat dihapuskan bagi seluruh umat manusia dan kejahatan kebencian antisemit yang belum pernah terjadi

sebelumnya," serunya.

Melalui video itu, Netanyahu juga bersumpah tak akan ada perubahan dalam tindakan Israel meski ICC mencoba melumpuhkan kepemimpinan politik dan militernya. Termasuk dari tindakan menyingkirkan Hamas dari Gaza dan menstabilkan perbatasan utara Israel.

"Tidak ada keputusan, baik di Den Haag maupun di mana pun yang akan merusak tekad kami untuk mencapai semua tujuan perang," kata dia.

Netanyahu juga mengancam ICC karena menargetkan pejabat IDF, dengan menyebut Israel memiliki salah satu tentara paling bermoral di dunia.

"Kamu tahu yang sebenarnya. Hamas menempatkan senjatanya, terorisnya di rumah sakit, sekolah, masjid, dan di seluruh wilayah sipil. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan kekebalan dan memaksimalkan korban sipil," pungkasnya.

Sinyal penerbitan surat penangkapan Netanyahu dan sederet pejabat Israel oleh ICC muncul di tengah diskusi gencatan senjata yang tak kunjung menemui kata sepakat.

Hingga kini Israel masih terus melancarkan serangan di Gaza, bahkan tengah menyiapkan invasinya ke Rafah meski dikecam sekutu.

PBB Soroti Serangan ke Rafah

Martin Griffiths Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan memperingatkan, bertambahnya bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak boleh dijadikan dalih oleh

Israel untuk melangsungkan serangan darat ke Rafah.

"Setelah hampir tujuh bulan pertempuran brutal yang telah membunuh puluhan ribu orang dan membuat puluhan ribu lainnya cacat, Gaza justru harus bersiap menghadapi semakin banyak penderitaan dan kesengsaraan," kata Griffiths dilansir Rabu (1/5/2024).

Walau komunitas internasional mendesak Israel untuk tidak menyerang kota Rafah yang terletak di Jalur Gaza bagian selatan, sejumlah laporan menunjukkan serangan darat Israel ke daerah tersebut akan segera terjadi.

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut untuk menghindari penyakit, kelaparan, dan pertempuran. Operasi tersebut hanya akan memperburuk trauma dan menimbulkan semakin banyak korban jiwa.

Dia menyoroti organisasi kemanusiaan yang aktif di Gaza saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti kerusakan akses jalan, artileri yang tidak meledak, kekurangan bahan bakar, lamanya proses di pos pemeriksaan, dan pembatasan Israel.(ant,wid,ist/dya)

5 PEMIMPIN NEGARA BURONAN ICC

1. Vladimir Putin

Dilansir dari laman resmi ICC, pada 17 Maret 2023, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang dalam konteks situasi di Ukraina, yakni Vladimir Vladimirovich Putin dan Ibu Maria Alekseyevna.

2. William Ruto

Sosok yang menjabat sebagai Presiden Kenya sejak 13 September 2022 ini pernah menjadi buron ICC ketika masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden di tahun 2011 lalu.

3. Laurent Gbagbo

Pada tahun 2011 lalu, mantan Presiden Pantai Gading ini harus menghadapi empat tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa mengatakan sekitar 3.000 orang tewas dalam empat bulan kekerasan yang dilakukan kedua belah pihak setelah Gbagbo menolak menyerah.

4. Muammar Gaddafi

Masih di tahun 2022, ICC juga memberikan surat penangkapan untuk Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Penangkapan ini terkait evolusi yang menewaskan warga sipil, khususnya di Tripoli, Benghazi dan Misrata.

5. Omar al-Bashir

Pimpinan militer dan politikus Sudan yang diincar ICV sejak tahun 2009. ICC menerbitkan dua surat perintah penangkapan terhadap Bashir, yakni pada Maret 2009 dan Juli 2010.

NETANYAHU

